

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2008 DALAM PENGAWASAN BANGUNAN DI
SEPANJANG PANTAI CERMIN KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD SYAFII

NPM : 1503100079

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : MUHAMMAD SYAFII
NPM : 1503100079
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAAIUN 2008 DALAM PENGAWASAN BANGUNAN DI
SEPANJANG PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI

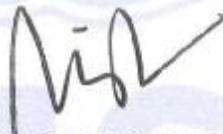
Medan, 04 Oktober 2019

PEMBIMBING



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : MUHAMMAD SYAFII
NPM : 1503100079
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Jumat, 04 Oktober 2019
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

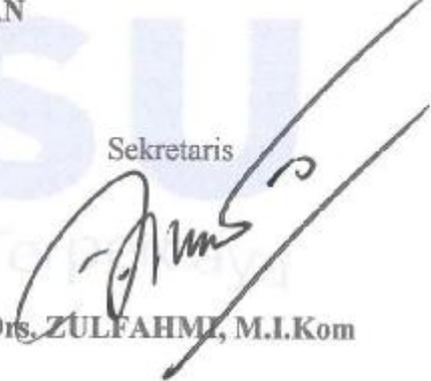
TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd (.....)
PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP (.....)
PENGUJI III : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN



Dengan ini saya, MUHAMMAD SYAFII, NPM 1503100079, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Oktober 2019
Yang Menyatakan



MUHAMMAD SYAFII
NPM. 1503100079



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : **Muhammad SYAFRI**
 N P M : **1503100079**
 Jurusan : **Ilmu Administrasi Publik**
 Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 dalam pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cermin kabupaten Serdang Bedagai**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
01	13/05/2009	Bimbingan tentang pemilihan proposal	[Signature]
02	16/05/2009	Bimbingan tentang latar belakang	[Signature]
03	16/07/2009	Bimbingan ACC seminar proposal	[Signature]
04	08/08/2009	Bimbingan daftar wawancara	[Signature]
05	09/08/2009	Bimbingan tentang revisi daftar wawancara	[Signature]
06	16/08/2009	ACC daftar wawancara	[Signature]
07	12/09/2009	Bimbingan tentang pembahasan dokumen untuk mengurus permissi masalah	[Signature]
08	21/09/2009	Bimbingan tentang hasil penelitian skripsi	[Signature]
09	27/09/2009	Bimbingan abstrak.	[Signature]
10	30/9/09	ACC sidang skripsi	[Signature]

Medan, 30 September 2009.

Dekan,

 (Dr. Arifin Saleh S.Sos.M.Pd)

Ketua Program Studi,

 (Nabilah Khairani S.Sos.M.Pd)

Pembimbing ke : I.

 (Dr. Arifin Saleh S.Sos.M.Pd)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 DALAM PENGAWASAN BANGUNAN DI SEPANJANG PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BDEDAGAI

MUHAMMAD SYAFII
NPM : 1503100079

Bangunan di sepanjang Pantai cermin merupakan bangunan yang dibuat khusus agar pembangunan tetap dapat dijalankan sambil meminimalkan masalah-masalah yang ditimbulkan akibat pembangunan itu sendiri. Selain itu penempatan bangunan yang ada di sepanjang Pantai Cermin dapat membantu juga untuk mengurangi masalah yang telah ada. Bangunan di sepanjang pantai itu sendiri dapat mampu mengatasi masalah erosi yang diakibatkan untuk menambah suplai sedimen. Pengawasan terhadap bangunan itu sendiri harus dilakukan secara terpadu agar bangunan tersebut terjaga kualitas dan keamanannya, bangunan di sepanjang Pantai Cermin dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu kontruksi yang dibangun di pantai dan sejajar garis pantai, kontruksi yang dibangun kira-kira tegak lurus pantai, dan kontruksi yang dibangun di lepas pantai dan kira-kira sejajar garis pantai. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 dalam pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cermin. Dalam penelitian; ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam daripada luas atau banyaknya informasi. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 6 orang, antara lain Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai, Kepala Bidang Pariwisata, kepala seksi Pemasaran Pariwisata, Pemilik bangunan dan 2 masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 dalam Pengawasan Bangunan di Sepanjang Pantai Cermin belum terlaksana dengan baik karena factor yang menjadi penghambat dalam pengawasan bangunan belum ditangani dengan baik . Akan tetapi, pelaksanaan program yang ada sudah dilaksanakan sesuai perintah yang berlaku. Pengaruh dimasyarakat belum sepenuhnya terlaksana, peran interaksi antar organisasi dinas yang terkait sudah terlaksana karena optimalnya dan efektifnya pendataan sesuai dengan syarat yang berlaku.

Kata Kunci : Implementasi, Pengawasan Bangunan di Sepanjang Pantai

KATA PENGANTAR

Bismillarrohmanirrohim

Assalamua'laikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Syukur alhamdulillah rabbal alamin atas kehadiran Allah subhannawataAllah, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah berkenan memberikan rahmat, kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan serta kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya taklupa pula penulis ucapkan Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar sarjana (S.AP) Ilmu sosial dan ilmu politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Dalam Pengawasan Bangunan di Sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai .**

Disadari dengan sepenuh hati, dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum cukup sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya, untuk itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima koreksi dan kritikan yang membangun dari pembaca yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang terutama dan paling utama kepada Allah SWT
2. Yang teristimewa kepada ayahanda Adi Jamaluddin dan ibunda Harmawati yang telah mencurahkan kasih sayang tak terhingga dan selalu memberikan Do'a, dukungan, serta bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dalam melanjutkan pendidikan perguruan tinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiyah., S.IP., M.Pd, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Arifin Saleh S.Sos., MSP selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen dan seluruh staff pengajar serta tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran, pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengemban perkuliahan.

8. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini
9. Kepada yang menjadi motivasi penulis agar dapat menyelesaikan studi dengan baik dan menjadikan pribadi yang kuat, tegas, bijaksana dan berguna bagi banyak hal Sri Ulina dan keluarga besar.
10. Kepada teman-teman keluarga Rizki, Iwan, Fanny, Hariansyah, Gunawan, Dimas, yang selama ini memberikan banyak pandangan tentang kehidupan serta menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan selama perkuliahan berlangsung hingga selesainya perkuliahan dan selalu memberikan dukungan serta bantuannya khususnya, Randi, Deni, Suwito, Harun, Putra, Heri, Roni, Iqbal dan teman sekaligus adik saya Sobri dan Reza Sukma .

Akhir kata penulis berharap skripsi ini berguna bagi kita semua, kiranya Allah SWT membalas kebaikan atas dukungan serta bantuan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis.

Wassalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Medan, September 2019

Penulis

Muhammad Syafii

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATAPENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB IPENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pembatasan Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II URAIAN TEORITIS.....	11
2.1 Implementasi.....	11
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	12
2.1.2 Pendekatan Implementasi	12
2.1.3 Kebijakan Publik	12
2.1.4 Ciri-ciri Kebijakan Publik	13
2.1.5 Jenis Kebijakan Secara Umum	14
2.1.6 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	14
2.1.7 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik ...	16
2.2 Bangunan, Pariwisata Pantai.....	17
2.2.1 Bangunan	18
2.2.2 Jenis Bangunan.....	18
2.2.3 Pariwisata.....	19
2.2.4 Infrastruktur di Objek Pariwisata.....	20
2.3 Pengawasan dan Pengendalian	21
2.3.1 Pengawasan	21
2.3.2 Pendekatan Pengawasan.....	22

2.3.3 Pengendalian	23
2.3.4 Langkah-langkah Proses Pengendalian.....	24
2.3.5 Bentuk Pengawasan dan Pengendalian	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Kerangka Konsep.....	27
3.3 Definisi Konsep	28
3.4 Kategorisasi	28
3.5 Narasumber.....	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7 Teknik Analisis Data	30
3.8 Lokasi Penelitian.....	31
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	31
3.9.1 Gambaran Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.....	31
3.9.2 Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai	34
3.9.3 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Serdang Bedagai.....	35
3.9.4 Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	36
3.9.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	37
3.9.6 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Hasil Penelitian	46
4.1.1 Deskripsi Narasumber.....	47
4.1.2 Implementasi Perda Kabupaten Serdang Bedagai	48
4.2 Pembahasan	56
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Simpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar riwayat hidup
Lampiran II	: Pedoman wawancara
Lampiran III	: SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran III	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran IV	: SK-3 Permohonan seminar proposal skripsi
Lampiran V	: SK-4 Undangan seminar proposal
Lampiran VI	: SK-5 Berita acara bimbingan Skripsi
Lampiran VII	: SK-10 Undangan ujian skripsi
Lampiran VIII	: Surat izin riset
Lampiran IX	: Surat Balasan

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Keadaan Narasumber berdasarkan jenis kelamin dan usia

Tabel 4.2 Keadaan Narasumber berdasarkan Pekerjaan dan Jabatan

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Laju pertumbuhan penduduk yang pesat di sertai dengan meningkatnya intensitas pembangunan di segala bidang, menyebabkan permasalahan dan konflik di bidang pertanahan juga semakin meningkat. Pemasalahan yang paling utama adalah terbatasnya ketersediaan lahan, terutama di kota-kota besar. Kondisi yang demikian memberikan alasan bagi para investor untuk menambah wilayah pesisir atau pantai dan menjadikannya sebagai tempat kegiatan usaha, mengingat selama ini wilayah pantai belum banyak tersentuh maupun dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan wilayah pantai tersebut meliputi kegiatan berbasis ekonomi, diantaranya sebagai lahan industri rekreasi/wisata, bangunan hotel resort, patung, pemukiman, pertanian dan sebagainya. Sementara itu, wilayah pantai merupakan kawasan dengan ekosistem yang khas karena memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan menyangga kehidupan masyarakat pantai, sehingga keberadaannya perlu dilestarikan.

Indonesia sebagai negara maritim mempunyai lebih dari 3700 pulau berpenghuni dan garis pantai sepanjang 80000 km. Pantai merupakan daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan dimulai dari garis batas tertinggi disebut dengan daratan. Daerah lautan adalah daerah yang

terletak di atas dan di bawah permukaan air laut dimulai dari sisi laut pada garis sudut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi dibawahnya. Sedangkan garis batas pertemuan antara darat dan air laut di mana posisinya tidak tetap dan berpindah sesuai pasang surut air laut dan erosi pantai yang terjadi disebut dengan garis pantai.

Wilayah pantai pada umumnya digunakan oleh penduduk untuk melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya, seperti sebagai kawasan industri, pelabuhan, aktivitas perikanan/pertanian, kawasan pemerintahan dan kawasan pariwisata. Dengan adanya beberapa kegiatan dibutuhkan berbagai prasarana dan sarana yang akan dibangun sepanjang pesisir pantai. Pembangunan prasarana dan sarana yang akan menimbulkan dampak dan masalah-masalah baru.

Masalah-masalah baru tersebut antara lain:

1. Erosi pantai yang merusak kawasan pemukiman dan prasarna kota yang berupa mundurnya garis pantai. Ini dapat disebabkan oleh penyebab alami seperti serangan gelombang atau akibat pengerusakan lingkungan akibat ulah manusia sendiri seperti penebangan hutan bakau yang tidak terkendali dan berbagai bentuk eksplitasi lainnya.
2. Tanah timbul akibat endapan pantai sehingga memajukan garis pantai, pemajuan garis pantai yang terjadi dapat memberikan keuntungan dan kerugian.
3. Pembelokan dan pendangkalan dapat menyebabkan tersumbatnya muara sungai. Hal ini akan menyebabkan banjir didaerah hulu.

4. Penurunan tanah dan intrusi air asin akibat pemompaan air tanah yang berlebihan.

Bangunan pantai yang dibuat khusus agar pembangunan tetap dapat dijalankan sambil meminimalkan masalah-masalah yang ditimbulkan akibat pembangunan itu sendiri. Selain itu penempatan bangunan pantai dapat membantu juga untuk mengurangi masalah yang telah ada. Bangunan pantai itu sendiri dapat mampu mengatasi masalah erosi yang diakibatkan untuk membah suplai sedimen.

Menurut Bambang Triatmodjo (2012) perencanaan bangunan ada dua istilah tentang kepantaian dalam bahasa indonesia yang sering rancu pemakaiannya, yaitu pesisir (coast) dan pantai (shore).

Perencanaan bangunan Pantai Sangatlah mendukung suatu kemajuan suatu daerah dalam meningkatkan potensi yang ada serta dalam rangka melindungi daerah pantai dari terpaan gelombang dan arus, maka dari itu sangat diperlukan perencanaan desain pengaman pantai yang tepat berhubungan dengan permasalahan dikawasan pantai yang ada dikecamatan pantai cermin kabupaten Serdang Bedagai, dari yang saya tinjau dari lokasi langsung, keindahan pantai di kecamatan pantai cermin merupakan daya tarik tersendiri untuk daerah ini, namun demikian pada saat musim gelombang daerah ini cukup potensial mendapatkan gempuran gelombang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan kerusakan terhadap fasilitas yang berada di daerah tersebut.

Pesisir atau wilayah pantai merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan, baik perubahan alam maupun perubahan akibat ulah manusia.

Fenomena yang terjadi saat ini sungguh sangat memprihatinkan dan membuat hati miris, dimana eksploitasi wilayah pantai hanya demi kepentingan pemilik modal besar. Sekitar 80 % wilayah pantai telah dikuasai swasta, termasuk pengusaha.

Pengelolaan dan pengembangan kawasan objek wisata di suatu daerah dapat dijadikan sebagai katalisator pembangunan sektor lain yang masih relevan dengan kepariwisataan, seperti: kamar untuk menginap(hotel), kuliner, perjalanan wisata (travel agent), dan industri kerajinan, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan perekonomian rakyat. Dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata alam di daerah kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, salah satu yang dikembangkan adalah objek wisata pantai yang ada di kecamatan Pantai Cermin, Seperti objek wisata pada umumnya. Bangunan yang berdiri disekitar pantai pun cukup banyak, namun sebagian besar bangunan dibangun untuk dijadikan daya tarik pengunjung untuk melihat bangunan tersebut, seharusnya Bangunan digunakan untuk melindungi pantai terhadap kerusakan karena serangan gelombang dan arus.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi pantai yaitu;

1. Memerkuat/melindungi pantai agar mampumenahan serangan gelombang,
- 2, Mengubah lagu transport sedimen sepanjang pantai,
3. Reklamasi dengan menambah suplai sedimen kepantai atau dengan cara lain.

Sesuai dengan fungsinya tersebut, bangunan pantai dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Kontruksi yang dibangun dipantai sejajar dengan garis pantai, contohnya dinding pantai atau revetment
2. kontruksi yang dibangun kira-kira tegak lurus pantai dan sambung ke pantai, contohnya groin dan jetty.
- 3, kontruksi yang dibangun lepas pantaidan kira-kira sejajar dengan garis pantai, contohnya pemecah gelombang.

Pantai-pantai di seluruh wilayah Indonesia mestinya terbuka untuk kepentingan umum. Namun ketika hotel-hotel, resort serta pemukiman mewah semakin menjamur dibangun sepanjang pantai, maka pantai tidak lagi menjadi ruang public dan terbebas dari monopoli pihak bermodal besar. Seperti yang terjadi di sepanjang Pantai Cermin atau pantai-pantai di kecamatan Pantai Cermin, bangunan atau property yang seharusnya dibangun paling minim berjarak 20 m dari garis batas air pasang, ternyata berdiri dan berpagar kokoh serta begitu mepet dengan bibir pantai bahkan sampai menjorok ke laut.

Fenomena banyaknya bangunan-bangunan di sepanjang pantai dan kerusakan lingkungan pantai serta kepentingan nelayan tradisional yang termajinalkan harus segera mendapat perhatian sekaligus penanganan serius. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pantai lebuuh jauh, diperlukan adanya kawasan sempadan pantai. Derah yang disebut sebagai sempadan pantai tersebut harus dijadikan derah konservasi. Dlam ketentuan Keppres No. 32 tahun 1990, diatur perlindungan sempadan pantai sejauh 100 meter. Peraturan

yang telah ada tersebut, hendaknya ditaati, ditegakkan, dan ditindak lanjuti dengan aturan-aturan pelaksana dibawahnya baik tingkat pusat maupun daerah. Sesuai dengan fungsinya, bangunan pantai dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu konstruksi yang dibangun di pantai dan sejajar garis pantai, konstruksi yang dibangun kira-kira tegak lurus pantai, dan konstruksi yang dibangun di lepas pantai dan kira-kira sejajar garis pantai.

Penggunaan tipe bangunan pantai ditentukan oleh beberapa factor yaitu ketersediaan material di lokasi atau di dekat lokasi pekerjaan, kondisi dasar laut, kedalaman air dan ketersediaan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan. di samping itu, karakteristik dasar laut juga menjadi salah satu faktor penting lainnya. Tanah dasar (fondasi bangunan) harus mempunyai daya dukung yang cukup sehingga stabilitas bangunan dapat terjamin. Indonesia sebagai negara maritim mempunyai lebih dari 3700 pulau berpenghuni dan garis pantai sepanjang 80000 km. Pantai merupakan daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah daerah yang terletak diatas dan dibawah permukaan daratan dimulai dari garis batas tertinggi disebut dengan daratan. Daerah lautan adalah daerah yang terletak diatas dan dibawah permukaan air laut dimulai dari sisi laut pada garis sudut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi dibawahnya.

Pentingnya pencegahan terhadap bangunan yang berdiri tidak sesuai dengan ketentuan dan semakin tertariknya masyarakat dalam berwisata membuat presiden pada tgl 14 juni 2016 menandatangani peraturan presiden nomor 51 tahun 2016 tentang batas sepadan pantai, peraturan presiden ini memuat norma pengaturan

tentang kriteria penetapan batas sempadan pantai yang menjadi dasar acuan bagi pemerintah daerah yang wilayahnya memiliki sempadan pantai untuk menetapkan batas sempadan pantainya.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 tahun 2008 tentang Pengelolaan objek wisata pesisir pantai dan sungai di Kabupaten Serdang Bedagai merupakan instrument untuk mencegah berdirinya segala jenis bangunan permanen di sepanjang sempadan pantai dan sungai sepanjang 15 m dari titik pasang tertinggi dan terendah, serta juga melarang membuka usaha atau berjualan di sepanjang sempadan pantai dan sungai sepanjang 15 dari titik pasang tertinggi dan terendah dan melarang mengambil atau memindahkan atau mengurangi tanah maupun pesisir serta segala sesuatu yang dapat mengubah atau merusak kondisi pinggir pantai dan pinggir sungai.

Sesuai dengan fungsinya, bangunan pantai dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu kontruksi yang dibangun di pantai dan sejajar garis pantai, kontruksi yang dibangun kira-kira tegak lurus pantai, dan kontruksi yang dibangun di lepas pantai dan kira-kira sejajar garis pantai.

Maka dari itu sangat diperlukan perencanaan desain pengaman pantai yang tepat berhubungan dengan permasalahan di kawasan pantai yang ada di Kecamatan Pantai Permin Kabupaten Serdang Bedagai, dari yang saya tinjau dari lokasi langsung, keindahan pantai di kecamatan pantai cermin merupakan daya tarik tersendiri untuk daerah ini, namun demikian pada saat musim gelombang daerah ini cukup potensial mendapatkan gempuran gelombang yang

dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan kerusakan terhadap fasilitas yang berada di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 dalam pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cermin Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai”

1.2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka diperlukan pembatasan masalah mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 dalam Pengawasan bangunan di Sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan didalam latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 dalam pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 dalam pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Secara Aspek Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis mengenai pengawasan bangunan disepanjang objek wisata Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.
- 1.3.2 Memberikan pemahaman mengenai bangunan di pantai yang sesuai dengan masalah yang terjadi di kawasan wisata pantai di kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

Mengetahui pengaruh-pengaruh perencanaan bangunan pengaman pantai dikawasan pantai yang ada di kecamatan Pantai Cermin.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Uraian Teoritis

Pada Bab ini berisikan serta menguraikan teori-teori tentang Implementasi, Pendekatan implementasi, Kebijakan Publik, Pariwisata, Pengawasan dan Pengendalian.

BAB III : Metode Penelitian

Pada Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, serta deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada Bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

BAB V : Penutup

Pada Bab ini memuat kesimpulan dan hasil dari penelitian serta saran-saran yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut Purwanto (2012:12) implementasi merupakan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Menurut Syauckani dkk (2004:295) implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil seperti yang di harapkan. Menurut Setiawan (2004:39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara pihak internal dan eksternal tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Harsono (2002: 67) menyatakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses kegiatan terencana yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.

2.1.2. Pendekatan Implementasi

Wahab (2014: 234) mendasarkan beberapa tipe pendekatan implementasi:

- a) pendekatan struktural, hal ini mengacu pada rancang bangun kebijakan dan rancangan bangun organisasi sedapat mungkin dipertimbangkan secara bersamaan
- b) pendekatan prosedural dan manajerial, hal ini mengacu pada upaya mengembangkan proses-proses dan prosedur-prosedur yang tepat termasuk prosedur manajerial beserta teknik-teknik manajemen yang relevan;
- c) pendekatan berperilaku, hal ini mengacu pada suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan;
- d) pendekatan politik, hal ini mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh di antara dan di dalam lingkungan organisasi. Alasan sederhana yang dapat dikemukakan bahwa implementasi suatu kebijakan bisa saja telah direncanakan dengan seksama, baik dilihat dari sudut organisasinya, prosedurnya, manajemennya, dan pengaruh-pengaruhnya pada perilaku.

2.1.3. Kebijakan Publik

Menurut Zukarnain Umar (2017:3) kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan atau aparat pemerintah.

Menurut Friedrich (2007: 20) bahwa kebijakan publik sebagian suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan mewujudkan sasaran yang di inginkan.

Menurut Chadler dan Plano dalam Tangkisilan (2003: 20) kebijakan publik pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan public merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrument yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut bahwa diperoleh gambaran awal mengenai konsep kebijakan publik yakni merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi di masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu yang telah di tetapkan sebelumnya.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara.

2.1.4. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut abidin (2012: 23) beberapa ciri-ciri kebijakan publik, yaitu:

a) setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan;

- b) kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum;
- c) kebijakan adalah apa yg dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah;
- d) kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

2.1.5. Jenis Kebijakan Secara Umum

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2012: 31) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

- a) kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan;
- b) kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang;
- c) kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

2.1.6. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai kebijakannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikannya kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang

ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Webster dalam Wahab (2014: 135) implementasi kebijakan publik diartikan "*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". Implementasi kebijakan publik berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat sesuatu tersebut.

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluan sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standard peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan.

Implementasi kebijakan publik begitu penting dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan hukum, jadi penulis mengambil kesimpulan implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi dan salah satu bentuk tahapan dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan atau serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.7. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Berbagai pendekatan dalam Implementasi Kebijakan, berkaitan dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan, ataupun tingkat kemajemukan yang di hadapi di masyarakat. Sumber daya manusia sebagai implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan publik ada beberapa faktor sebagai pendukung implementasi kebijakan publik tersebut.

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

a. **Komunikasi**

Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang harus mengimplementasikan suatu kebijakan harus tahu apa yang mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi juga harus akurat pula diterima oleh implementor.

b. **Sumber Daya**

Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian

lainnya yang terlibat didalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) didalamnya atau harus memberikan pelayanan.

b. Disposisi

Sikap dari implementor sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. apabila implementor memiliki sikap baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di inginkan oleh pembuat kebijakan, begitu juga sebaliknya.

c. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik di pengaruhi oleh beberapa faktor penting yang mempengaruhi terlaksananya kebijakan tersebut. Implementasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks karena banyak faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan.

2.2. Bangunan, Pariwisata Pantai

Bangunan di tempat wisata merupakan salah satu hal yang tidak asing lagi, dimana bangunan dalam hal ini merupakan faktor penting dalam kenyamanan

pengunjung dan menjadi daya tarik pengunjung di tempat wisata, termasuk di wisata pantai yang ada di kecamatan pantai cermin kabupaten serdang bedagai

2.2.1. Bangunan

Bangunan adalah buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen disuatu tempat, bangunan juga bisa disebut dengan rumah dan gedung yaitu segala sarana, prasarana dan infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya

Menurut Vitruvius didalam bukunya *De architectura*, bangunan yang baik haruslah memiliki keindahan atau estetika (*venustas*), kekuatan (*virmitas*), dan kegunaan atau fungsi (*utilitas*). Sehingga bangunan tidak hanya sekedar berdiri saja, melainkan harus memiliki tiga unsur yang disebutkan diatas (Sumoharjo, 2009).

2.2.2. Jenis Bangunan

Bangunan Pantai adalah segala jenis infrastruktur yang dibangun di garis pantai dan dapat berfungsi sebagai pelindung pantai dan darat atau pelabuhan. Dibawah ini merupakan 9 macam jenis bangunan pantai dan pengertiannya, Berikut beberapa jenis dari bangunan pantai

a) Sea dikes:Sea Dikes salah satu struktur pantai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi daerah dataran rendah terhadap banjir akibat air laut yang masuk. Sea dikes dibangun dari material halus seperti pasir dan tanah liat dan dibentuk seperti gundukan dengan kemiringan yang landai agar mengurangi efek erosi dari gelombang yang datang. Permukaan tanggul biasanya berupa rumput, aspal, bebatuan ataupun beton bertulang.

Menurut ilmu geologi, adalah lembaran batuan yang terbentuk di rekahan pada tubuh batuan yang sudah ada. Dike dapat berasal baik magmatik maupun sedimen,

dike magmatik terbentuk ketika magma mengintrusi ke celah batuan yang ada kemudian mengkristal sebagai intrusi lembar, baik memotong seluruh lapisan batuan atau melalui massa batuan yang tak berlapis. Dike klastik terbentuk ketika sedimen mengisi rekahan batuan yang telah ada.

b) Seawalls dan Revetments: Seawalls merupakan struktur pantai yang memiliki fungsi utama untuk mencegah atau mengurangi limpasan air laut dan banjir terhadap tanah dan struktur yang berada di belakang daerah pantai akibat badai dan gelombang. Seawalls dibangun sejajar dengan garis pantai sebagai penguat bagian dari profil pantai.

Seawalls biasanya juga sering digunakan untuk melindungi promenade, jalan, dan rumah-rumah, biasanya struktur ini dipasang menghadap ke laut dari tepi puncak profil alami pantai. Seawall pada umumnya dibuat dari konstruksi padat seperti beton, turap baja/kayu, pasangan batu atau pipa beton sehingga seawall tidak meredam energi gelombang, tetapi gelombang yang memukul permukaan seawall akan dipantulkan kembali dan menyebabkan gerusan pada bagian tumitnya. Revetments adalah struktur onshore dengan fungsi utama melindungi garis pantai dari erosi.

2.2.3. Pariwisata

Pariwisata adalah kegiatan bersifat dinamis yang melibatkan banyak manusia baik secara individu maupun kelompok serta menghidupkan berbagai

bidang usaha. Beberapa istilah kepariwisataan dijabarkan supaya orang menjadi terbiasa. Tujuan perjalanan juga akan dikupas sehingga perbedaan wisatawan vakansi dan wisatawan bisnis perlu dijelaskan berikut dengan ciri-ciri yang membedakannya. Masing-masing wisatawan memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda sehingga penanganan dan pelayanan serta fasilitas dan sarana prasarannya perlu pendekatan yang khusus.

Suwantoro (1997), Pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seorang atau lebih menuju tempat lain dari luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan uang.

2.2.4. Infrastruktur di objek pariwisata

Menurut Suwantoro dalam bukunya *Dasar-dasar pariwisata* (1997:23) infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas permukaan tanah dan dibawah tanah seperti:

1. Sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air limbah yang membantu sarana perhotelan/restoran.
2. Sumber listrik dan energi serta jaringan distribusinya yang merupakan bagian vital bagi terselenggaranya penyediaan sarana wisata yang memadai.
3. Sistem jalur angkutan dan terminal yang memadai dan lancar akan memudahkan wisatawan untuk mengunjungi objek-objek wisata.
4. Sistem komunikasi yang memudahkan para wisatawan untuk mendapatkan informasi maupun mengirimkan informasi secara tepat dan tepat.
5. Sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan di berbagai sektor bagi para wisatawan. Keamanan di terminal, diperjalanan dan di objek-objek wisata, di pusat-pusat perbelanjaan akan meningkatkan daya tarik suatu objek wisata maupun daerah tujuan wisata. Infrastruktur

yang memadai dan terlaksana dengan baik di daerah tujuan wisata akan membantu meningkatkan fungsi sarana wisata, seekaligus membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

2.3. Pengawasan dan Pengendalian

2.3.1. Pengawasan

Pengawasan perlu dilakukan untuk menetapkan tujuan, menetapkan rencana, hingga melakukan berbagai tindakan yang akan memotivasi orang agar dapat menjalankan apa yang telah direncanakan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Menurut Schermerhorn dalam Tisnawati dan Saefullah (2005: 317) mendefenisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan ini menekankan pada penetapan standar kinerja dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Menurut Simbolon (2004: 51) pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahannya sesuai dengan kelayakan rencana, perintah, tujuan, dan kebijakan yang telah ditentukan.

Dari pemaparan diatas ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah proses untuk memastikan apakah apa yang telah direncanakan dapat berjalan semestinya atau tidak dan jika tidak berjalan semestinya, maka pengawasan melakukan proses

untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Langkah-langkah dalam proses pengawasan sebagai berikut:

- a) Penetapan standar dan metode penilaian kinerja, tujuan harus ditetapkan dengan jelas dan memuat standar pencapaian tujuan.
- b) Penilaian kinerja, upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan semula.
- c) Melakukan tindakan koreksi jika terdapat masalah, dengan mencari jawaban mengapa masalah tersebut terjadi yaitu kinerja dibawah standar, lalu kemudian melakukan berbagai tindakan untuk mengoreksi masalah tersebut.

2.3.2. Pendekatan Pengawasan

Menurut Dessler dalam Tisnawati dan Saefullah (2005: 344) pendekatan pengawasan terdiri dari:

- a) Pengawasan Tradisional, upaya atau sistem untuk mempertahankan fungsi pengawasan melalui prosedur dan kegiatan yang melibatkan penentuan standar dan berbagai upaya untuk mencapai standar tersebut. Terdapat tiga pendekatan dalam pengawasan tradisional;
 - 1) pengawasan diagnostik adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi dimana setelah standar ditetapkan;
 - 2) pengawasan berdasarkan batasan-batasan adalah pengawasan yang dilakukan melalui penetapan aturan;
 - 3) pengawasan interaktif adalah pengawasan yang dilakukan

oleh instansi yang secara interaktif dan terus menerus melakukan komunikasi terkait dengan pekerjaan dilakukan.

- b) Pengawasan yang berdasarkan komitmen, pengawasan ini lebih menekankan pada fungsi pengawasan dari sisi internal daripada eksternal. Pengawasan yang berdasarkan komitmen mendasarkan sistem pengawasan kepada kesadaran dari setiap individu atau pekerja akan apa yang terbaik yang seharusnya ditunjukkan oleh mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Pengawasan lebih ditekankan oleh faktor internal dari setiap individu pekerja.

2.3.3. Pengendalian

Menurut Robbins and Coulter dalam Solihin (2009: 193) pengendalian merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas perizinan yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Tjakrawala (2002: 18) Pengendalian adalah satu dari tiga fungsi perencanaan dan pengendalian yang ada dalam setiap hampir organisasi. Dua diantaranya adalah Formulasi strategi, yaitu jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran ,dan pengendalian tugas yaitu proses memastikan bahwa tugas tertentu dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pengendalian kualitas adalah suatu sistem verifikasi dan penjagaan/perawatan dari suatu tingkatan/derajat kualitas produk atau proses yang dikehendaki dengan cara perencanaan yang seksama, pemakaian peralatan yang sesuai, inspeksi yang terus menerus, serta tindakan korektif bilamana diperlukan.

Dengan demikian hasil yang diperoleh dari kegiatan pengendalian kualitas ini benar-benar dapat meningkatkan kualitas dari suatu produk serta memenuhi standar–standar yang telah direncanakan/ditetapkan oleh pelanggan (Sulaeman, 2014, Jurnal PASTI Volume VIII No 1, 71 – 95).

Menurut Lorange dalam Solihin (2009: 193) sistem pengendalian adalah seperangkat instrumen yang terdiri dari penetapan tujuan secara formal, pemantauan kinerja, evaluasi kinerja dan sistem pemberian umpan balik yang akan memberikan berbagai informasi apakah strategi dan struktur organisasi yang saat ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian merupakan alat untuk mengukur suatu objek yang ditentukan dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan telah tercapai tujuannya. “Fungsi pengawasan dan pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2.3.4. Langkah-langkah Proses Pengendalian

Proses pengendalian terdiri dari empat aktivitas, yaitu:

- a. Penetapan tujuan, proses pengendalian diawali dengan adanya penetapan terlebih dahulu berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, strategi untuk mencapai tujuan tersebut, sampai penentuan pada anggaran yang menunjukkan rencana alokasi masing-masing sumber daya organisasi dalam menunjang pencapaian tujuan. Baik tujuan, strategi, maupun anggaran semuanya dapat dijadikan standar

untuk menjadi pembanding terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya dapat dilakukan.

- b. Pengukuran merupakan penetapan satuan terhadap suatu objek yang diukur.
- c. Membandingkan merupakan proses membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Tindakan managerial, langkah terakhir ini dari proses pengendalian adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dicapai organisasi secara keseluruhan maupun kinerja individu.

2.3.5. Bentuk Pengawasan dan pengendalian

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 bentuk pengawasan dan pengendalian terbagi dua yaitu:

- 1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara terpadu dibawah kordinasi kepala daerah.
- 2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis artinya terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Secara bahasa, kata metodologi berasal dari kata *method* dan *logos* yang berarti ilmu penelitian yang mengkaji tentang metode. Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber.

Menurut Arikunto (2010: 03) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Menurut Moleong (2013:05) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap,

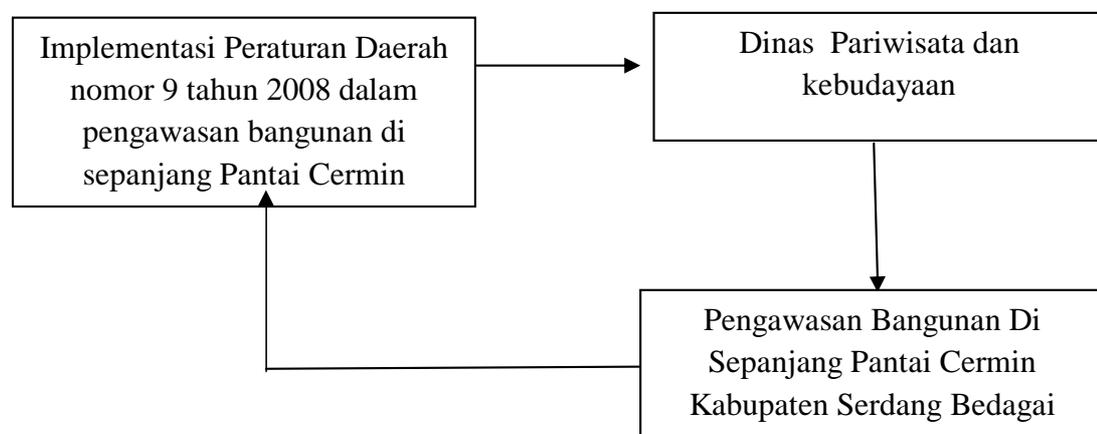
pandangan, perilaku, sikap pandangan, perilaku individu dan kelompok orang. Pendekatan ini di arahkan kepada latar belakang individu secara kualistik menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran realita yang kompleks dalam melihat adanya koordinasi dalam meningkatkan perencanaan pembangunan.

3.2. Kerangka Konsep

Sugiyono (2009:66) menyebutkan bahwa kerangka berfikir dalam surat penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping menggunakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran yang diteliti.

Gambar.I
Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang di pakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



3.3. Defenisi Konsep

Adapun beberapa konsep dalam penelitian yang harus di definisikan sebagai berikut:

1. Implementasi adalah proses kegiatan terencana yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.
2. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi dan salah satu bentuk tahapan dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan atau serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
3. Pengawasan adalah sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

3.4. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 dalam pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai“ dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Adanya pelaksanaan
- b. Adanya pengawasan
- c. Adanya penindakan

3.5. Narasumber

Adapun narasumber penelitian ini adalah :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai
 - a) Kepala Dinas (Bapak Sudarsono.S.sos)
 - b) Kepala Bidang (Bapak Martin Maulana Marpaung)
 - c) Kepala Seksi (Bapak Boy Reonaldi)
2. Pemilik Bangunan dan Masyarakat Setempat Pantai Cermin
 - a) Pemilik Bangunan (Bapak Asiong)
 - b) Tokoh Masyarakat (Bapak Surya)
 - c) Masyarakat (Bapak Subardi)

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak-

pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.

- 2) Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik yang dilakukan melalui study kepustakaan yang terdiri dari.
 - a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.
 - b. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dengan berbagai literature seperti : dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Data yang di peroleh dari hasil wawancara akan di uraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

Analisis data menurut Moleong (2003:1003), adalah proses mengatur urusan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus-menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Dalam roses analisis terdapat tiga jalur yang terjadi secara bersamaan menentukan hasil akhir, yaitu:

1. Reduksi data, Merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstraksi data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.
2. Penyajian data. Merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.
3. Penarikan kesimpulan, adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pematapan penelusuran data.

3.8. Lokasi Penelian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana kita melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang kita perlukan dalam melakukan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

a. Sejarah Serdang Bedagai

Kabupaten Serdang Bedagai yang beribukota Sei Rampah adalah kabupatenyang baru dimekarkan dari Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan UU RI Nomor 36 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Bupati pertama adalah Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si dan Wakil Bupati nya Ir. H. Soekirman Kedua pimpinan ini dikenal sebagai pimpinan yang sangat kompak, sehingga menjadikan Serdang Bedagai menjadi kabupaten pemekaran terbaik di Indonesia, dan kabupaten terbaik di Sumatera Utara.

Proses lahirnya undang-undang tentang pembentukan kabupaten serdang bedagai sebagai kabupaten merujuk pada usulan yang disampaikan melalui keputusan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sumatera utara nomor 18/K/2002 tanggal 21 agustus 2002 tentang persetujuan pemekaran kabupaten Deli Serdang.

Kemudian keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Deli Serdang Nomor 26/K/DPRD/2003 tanggal 10 Maret 2003 tentang persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Deli Serdang atas usul rencana pemekaran kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) kabupaten (kabupaten deli serdang (induk) dan kabupaten Serdang Bedagai. Kabupaten yang luasnya mencapai 1.900,22 kilometer persegi ini, terdiri atas 243 desa/kelurahan yang berada dalam 13 kecamatan.



Gambar II

Peta Kabupaten Serdang Bedagai

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada posisi $2^{\circ}57''$ Lintang Utara, $3^{\circ}16''$ Lintang Selatan, $98^{\circ}33''$ - $99^{\circ}27''$ Bujur Timur dengan ketinggian berkisar 0-500 di atas permukaan laut. Kabupaten Serdang Bedagai memiliki area seluas 1.900,22 Km (190,022 Ha). Yang terdiri dari 17 kecamatan dan 243 desa/kelurahan.

3.9.2. Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai

Seperti halnya daerah lain, Serdang Bedagai juga memiliki Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

Menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu Kabupaten terbaik di Indonesia dengan masyarakatnya yang pancasila, religious modern dan kompetitif .

2. Misi

Untuk mencapai misi di susun misi Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut:

1. Mendayagunakan potensi SDM dan SDA secara optimal dalam konsep otonomi daerah dengan tetap berada dalam bingkai wawasan nasional dan wawasan kebangsaan.
2. Menegakkan supremasi hukum guna terciptanya iklim yang kondusif bagi pemerintahan yang bersih dan berwibawah, kegairahan perekonomian dan berkembangnya kehidupan social kemasyarakatan.
3. Memanfaatkan dinamika kemajemukan masyarakat Serdang Bedagai sebagai factor pendukung terbinanya masyarakat yang kompratif dan kompetitif.

3.9.3 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai dalam bidang budaya dan pariwisata berdasarkan asas otonomi daerahnya.

Mulalui kantor Dinas pariwisata dan kebudayaan atau yang disingkat Disparbud ini, berbagai urusan pemerintah daerah terkait bidang pariwisata dan kebudayaan dilakukan. Adapun tugas Disparbud adalah sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah pada bidang pariwisata dan pelestarian budaya di wilayah kerjanya. Fungsi Disparbud ialah merumuskan kebijakan bidang pariwisata, kesenian, kebudayaan dan perfilman, penyelenggara pariwisata dan kebudayaan, pembinaan dan pembimbingan pada pelaku pariwisata dan budaya di wilayah kerjanya, koordinator UPTD, hingga pelaporan dan koordinasi urusan pariwisata dan budaya.

Terkait dengan tugas dan fungsinya, Disparbud berwenang untuk mengeluarkan izin-izin bidang pariwisata meliputi Izin Usaha Pariwisata untuk travel agent dan lainnya, mengurus Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP), Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP meliputi surat Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata, Tanda Daftar Usaha Penyedia Akomodasi, Tanda daftar Usaha Kawasan Pariwisata, dan lainnya. Selain izin-izin bidang pariwisata, Disparbud juga memiliki wewenang dalam mengeluarkan izin terkait bidang kebudayaan seperti kegiatan kebudayaan, alih fungsi bangunan bersejarah dan lainnya.

3.9.4. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Seperti halnya daerah lain, Serdang Bedagai juga memiliki Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Visi

Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

Terwujudnya Kabupaten Serdang Bedagai Menjadi Daerah Tujuan Wisata yang Berbudaya dan Berdaya Saing.

2. Misi

Adapun Misi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

1. Melindungi dan Melestarikan Nilai Budaya dan Kekayaan Budaya, yang bermakna meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian, meningkatkan pelestarian nilai-nilai tradisi dan peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya.
2. Mengembangkan Pariwisata menjadi Daerah Tujuan Wisata yang Berdaya Saing, yang bermakna pengembangan pariwisata melalui promosi dan pencitraan pariwisata sehingga menghasilkan produk destinasi pariwisata yang berdaya saing dan berbasis Sapta Pesona/Sadar Wisata.

3. Meningkatkan Profesionalisme SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, yang bermakna peningkatan kapasitas dan profesionalisme melalui pengembangan standart kompetensi dan sertifikasi terhadap profesi pelaku kebudayaan dan pariwisata serta peningkatan kerjasama dan kemitraan/kelembagaan.
4. Meningkatkan Industri Kepariwisata, yang bermakna penciptaan inovasi melalui penelitian dan pengembangan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

3.9.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

(1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati Serdang Bedagai melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan;
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan; dan
- e) pelayanan administrasi dinas sesuai lingkup tugasnya; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan.

(3) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan;

- c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan;
- d. melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah;
- e. mengatur kebijakan teknis sebagai pedoman, pemberian bimbingan dan rekomendasi perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. memberikan rekomendasi perizinan bidang pemuda, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan;
- g. melaksanakan pembinaan personil pembiayaan, pengelolaan sarana dan prasarana di Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan;
- h. melaksanakan pembinaan, dan pengembangan olahraga secara berlanjut dan berkesinambungan;
- i. melaksanakan pengembangan kebudayaan, nilai-nilai tradisi, kesenian, kesejarahan dan kepurbakalaan;
- j. menyelenggarakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan perfilman kebudayaan;
- k. membagi tugas atau kegiatan bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik lisan atau tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;

- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas dibantu oleh:

- a. Sekretaris
- b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- c. Bidang Pariwisata
- d. Bidang Kebudayaan
- e. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. SEKRETARIS

(1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit

organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sekretariat dan lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan;
- c. menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;

- d. merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada atasan;
- e. mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- f. menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
- g. menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

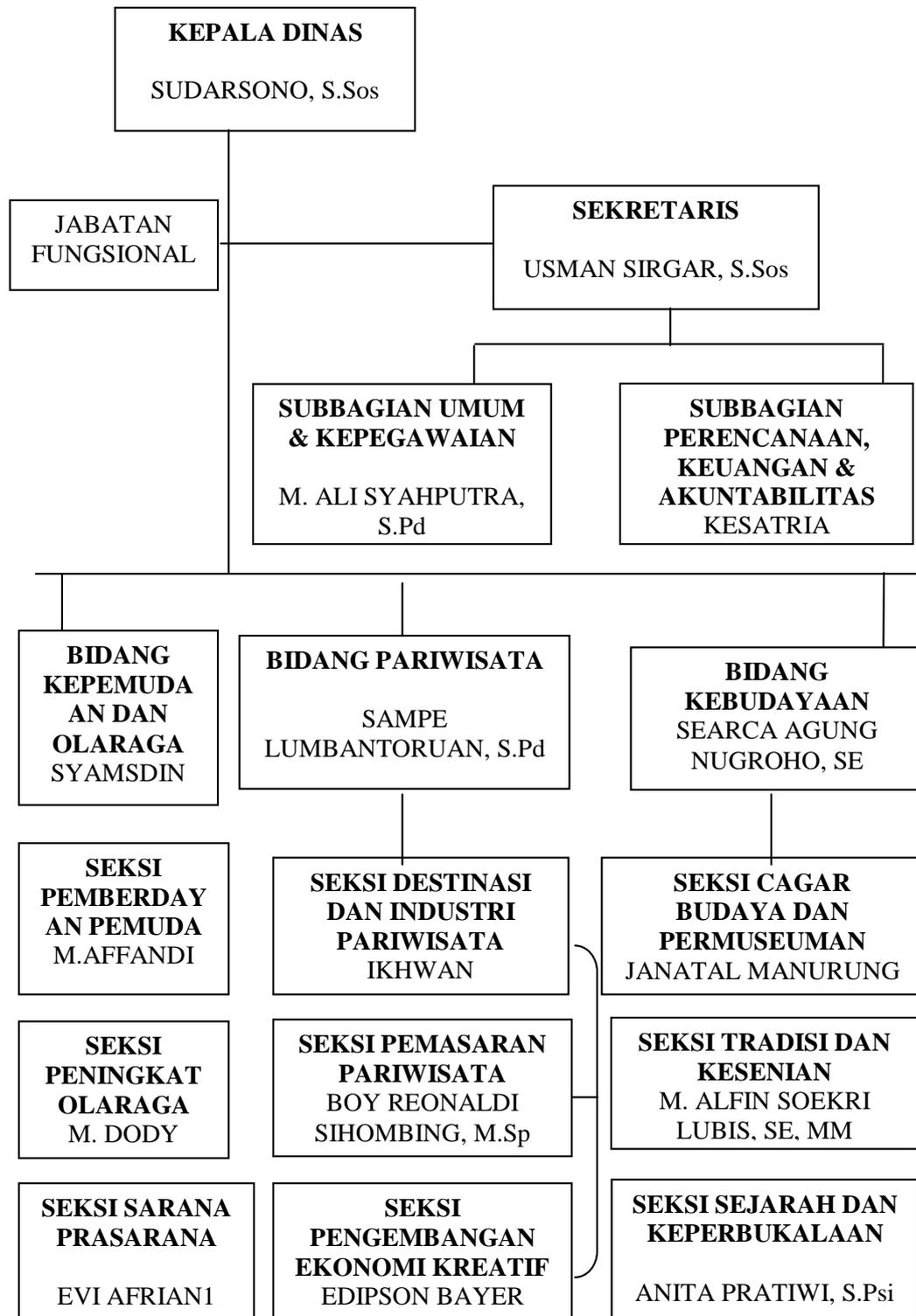
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:
 - a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang umum, kepegawaian dan perlengkapan;

- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- e. memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat menyurat menurut jenisnya;
- f. melaksanakan pengadaan peralatan kantor sebagai penunjang kelancaran tugas;
- g. menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan;
- h. mengumpulkan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan;
- i. melaksanakan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara umum di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan;
- j. menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari pemecahan masalah;
- k. menyiapkan bahan dalam rangka pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana bantuan pemerintah dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Dinas PPKAD disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;

- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.9.6 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Serdang Bedagai



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada saat penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab yang terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya: Pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 5 orang informan penelitian yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang , Kepala Sesi, Pemilik bangunan dan Tokoh Masyarakat.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 3 September 2019 di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Tabel 4.1

Keadaan Narasumber berdasarkan jenis kelamin dan usia

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA
1	Sudarsono S.Sos,	Laki-laki	53 tahun
2	Boy Reonaldi	Laki- laki	53 tahun
3	Martin Maulana	Laki-laki	35 tahun
4	Asiong	Laki-laki	40 tahun
5	Surya	Laki-laki	55 tahun
6	Subardi	Laki-Laki	24 tahun

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019

Tabel 4.2

Keadaan Narasumber berdasarkan Pekerjaan dan Jabatan

NO	NAMA	PEKERJAAN	JABATAN
1	Sudarsono S.Sos,	PNS	Kepala Dinas
2	Boy Reonaldi	PNS	Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata
3	Martin Maulana	PNS	Kabid. Pariwisata
4	Asiong	Wiraswasta	Pemilik Bangunan
5	Surya	Wiraswasta	Tokoh Masyarakat
6	Subardi	Mahasiswa	Masyarakat

Sumber : Hasil penelitian tahun 2019

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan baik dari pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maupun masyarakat. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang telah diteliti.

4.1.2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 dalam Pengawasan Bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai tidak terlepas dari adanya komunikasi dengan pihak internal dan eksternal, sebab pada dasarnya komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam pemerintahan sebagai bentuk koordinasi antar anggota atau tim untuk pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Komunikasi dengan pihak internal dan eksternal ini dilakukan sebagai dasar dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai yang bertujuan meningkatkan kualitas terhadap bangunan yang ada di sepanjang Pantai Cermin dan dalam mewujudkan bangunan di sepanjang pantai yang layak teratur dan tidak merusak ekosistem lingkungan Pantai.

Hal tersebut didukung oleh pendapat yang diungkapkan oleh Setiawan (2004) yang mengatakan bahwa suatu keberhasilan dari implementasi dalam pemerintahan menyesuaikan bentuk koordinasi antar pihak internal dan eksternal agar mencapai tujuan dan tindakan yang efektif. Jadi, komunikasi dengan pihak internal dan eksternal dalam implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2008 di Kabupaten Serdang Bedagai sudah dilakukan dengan baik koordinasinya walaupun masih ada aparatur pemerintah terkait

Pengawasan dan pengendaliannya yang bekerja belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 terkait pengawasan dan Pengendalian bukan saja membutuhkan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal melainkan juga adanya pelaksanaa. pelaksanaan dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 dalam Pengawasan Bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai baik mereka melakukan tugas dengan kemampuan mereka masing-masing. Dengan awalnya masyarakat tidak mendukung tetapi setelah melakukan sosialisasi dengan baik pelaksanaan berjalan dengan baik dan mendapat respon yang positif dari Masyarakat.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Purwanto (2012) yang mengatakan bahwa untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Sikap pelaksanaan dalam hal ini untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 sebagai dasar melakukan Pengawasan dan Pengendalian Bangunan di sepanjang Pantai Cermin.

Selanjutnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 dalam Pengawasan Bangunan di sepanjang Pantai Cermin yaitu adanya Pengawasan yang berfungsi sebagai input organisasi suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat Pengamanan dan Pengetahuan. Pengawasan dan pengendalian Bangunan di sepanjang Pantai Cermin berjalan sesuai dengan standar dan keinginan yang telah ditetapkan. Semua berjalan dengan apa

adanya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan tanpa ada kendala dan penghambat.

Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Syaukani, dkk (2004) yaitu Pengawasan diperlukan sebagai serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil seperti yang diharapkan. Pengawasan juga sebagai factor yang mempengaruhi implementasi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan.

A. Adanya Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan kebijakan. Sikap Penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus di selesaikan.

Penggunaan indikator ini untuk mengetahui seberapa besar sikap dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 dalam Pengawasan Bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sudarsono selaku Kepala Dinas di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan atau pegimplementasian perda nomor 9 tahun 2008 dalam pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yaitu positif dan berjalan dengan baik. Respon dari Pemilik bangunan baik dan tidak ada hambatan dalam melakukan implementasi perda ini. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2019 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Martin selaku Kepala Bidang Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai ketika penulis melakukan wawancara mengenai sikap pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 09 tahun 2008 dalam pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cermin. Berikut wawancara yang dilakukan:

“Pelaksanaan atau pengimplementasian peraturan daerah nomor 9 tahun 2008 dalam pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai pelaksanaannya berjalan dengan semestinya. Kami senang karena respon masyarakat dan pemilik bangunan baik, kami bisa menyisihkan uang untuk keperluan masyarakat bagi masyarakat yang mengurus berkas di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai).

Selanjutnya bapak Boy reonaldi selaku Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai mengatakan bahwa sikap pelaksanaan peraturan daerah nomor 9 tahun 2008 dalam pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sangat baik. Berikut wawancara yang dilakukan:

“Bahwasannya dalam Pelaksanaan perda nomor 9 tahun 2008 dalam pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai baik dan positif kami menjalankan tugas dengan kemampuan kami masing-

masing. Sejauh ini hambatan tidak ada yang penting bekerja keras saja”(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai)

Penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Asiong selaku pemilik bangunan yang berada di sepanjang pantai, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan peraturan daerah nomor 9 tahun 2008 dalam pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai berjalan maksimal. Berikut wawancara yang dilakukan:

“Pelaksanaan tentang perda nomor 9 tahun 2008 dalam pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai saya rasa sudah berjalan dengan baik dan maksimal walaupun tidak berdampak banyak terhadap kami, tapi saya rasa pelaksanaan yang dilakukan dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah positif”(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2019 di desa Pantai Cermin kanan Kecamatan Pantai Cermin)

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai peraturan daerah nomor 9 tahun 2008 dalam pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai baik mereka melakukan tugas dengan kemampuan mereka masing-masing. Dengan awalnya masyarakat tidak mendukung tetapi setelah melakukan sosialisasi dengan baik pelaksanaan mendapat respon positif dari masyarakat artinya pelaksanaan berjalan dengan baik.

B. Adanya Pengawasan

Pengawasan merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Pengawasan diposisikan sebagai input organisasi suatu sistem yang

mempunyai implikasi yang bersifat Pengamanan dan pengetahuan. Secara keamanan, pengawasan berkaitan dengan tindakan atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedang secara pengetahuan, pengawasan berkaitan dengan kemampuan mendapatkan informasi dari organisasi.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sudarsono selaku Kepala Dinas di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai mengenai pengawasan terkait pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Berikut wawancara yang dilakukan :

“Pengawasan dan pengendalian bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sejauh ini sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan pengawasan bangunannya serta melibatkan instansi maka dijalankan dengan secara optimal” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2019 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai).

Sehubungan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Martin selaku Kepala Bidang Pariwisata di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai mengenai Pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cermin mengatakan:

“Dalam Pengawasan bangunan di sepanjang pantai kami berkordinasi dengan Satpol pp dan Dinas Perizinan Terpadu untuk mengawasi bangunan yang ada di sepanjang Pantai Cermin, pengawasan yang kami lakukan sangat intensif, namun saat ini kami belum menemukan kendala dilapangan” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019 di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Beagai).

Senada dengan itu, penulis melakukan wawancara dengan bapak Boy reonaldi selaku Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai mengenai Pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Berikut wawancara yang dilakukan :

“Pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cermin sudah kami lakukan dan kami jalankan secara baik, dalam hal pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cermin kami berkordinasi dengan pihak terkait seperti Satpol pp dan Dinas Perizinan Terpadu, pengawasan kami lakukan secara rutin dilapangan”(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai).

Penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Asiong selaku pemilik bangunan mengenai Pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, Beliau mengatakan:

“Pengawasan yang dilakukan terhadap bangunan di sepanjang Pantai Cermin sudah berjalan baik, kami cukup terbantu dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait terhadap bangunan kami,namun kami juga melakukan pengwasan sendiri terhadap bangunan kami dengan menggunakan Scurity”(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2019 di Pantai Cermin kanan Kecamatan Pantai Cermin).

Berdasarkan pengamatan penulis Pengawasan terhadap bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai berjalan sesuai dengan standart dan keinginan yang telah ditetapkan. Semua berjalan dengan apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan tanpa ada kendala dan

penghambat dalam Pengawasan sehingga bisa dijadikan pedoman dalam Pengawasan yang akan datang untuk lebih baik lagi.

C. Adanya Penindakan

Penindakan adalah salah satu kegiatan pengawasan yang dimana kegiatannya sangat bereiko, didalamnya tidak jarang terjadi kontak fisik, kejar-kejaran antara petugas dengan terduga, dan kejadian lainnya. Butuh kemampuan teknis dan administrasi yang baik untuk melakukan penindakan yang sukses. Dengan demikian, Penindakan lebih merupakan instrument pengawasan atau berkarakter sebagai pemberi efek jera.

Menurut Bapak Sudarsono selaku Kepala Dinas di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai ketika melakukan wawancara mengenai Penindakan terhadap bangunan di sepanjang Pantai Cermin. Berikut wawancara yang dilakukan :

“Penindakan yang dilakukan adalah dengan menertibkan, oleh penegak Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dan penindakan lainnya adalah dengan memberi teguran dan sanksi berupa tidak diberi izin mengelola” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2019 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai).

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Subardi selaku Masyarakat setempat di Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai mengenai penindakan terhadap bangunan di sepanjang Pantai Cermin. Berikut wawancara yang dilakukan :

“Saya selaku masyarakat setempat menginginkan pemerintah bertindak tegas dan memberi sanksi terhadap bangunan yang tidak sesuai aturan karena bangunan yang melanggar tersebut bias merusak ekosistem di tempat wisata pantai yang ada di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai”(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2019 di Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin).

Hal Senada juga disampaikan oleh Bapak Surya Selaku Tokoh Masyarakat di Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai mengenai penindakan terhadap bangunan di sepanjang Pantai Cermin. Berikut wawancara yang dilakukan:

“Saya selaku tokoh Masyarakat setempat berharap jika ada bangunan yang melanggar aturan dan tidak sesuai izin agar ditindak tegas dan di beri sanksi yang berat karena ini demi kebaikan lingkungan kita”(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2019 di Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin).

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai adanya Penindakan terhadap bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Sudah mengikuti prosedur yang berlaku. Pemerintah memberkan izin untuk membangun dan mengelola berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah semua berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 dalam Pengawasan Bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, maka penulis

akan menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang disajikan pada bagian sebelumnya.

Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Bidang Pariwisata, Kepala Seksi Pengawasan Dan Restribusi, Pemilik bangunan, Tokoh Masyarakat dan masyarakat setempat Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin. Data yang diperoleh oleh penulis telah disusun dengan sistematis pada bagian sebelumnya, baik melalui wawancara maupun berupa berkas serta catatan-catatan yang diperoleh penulis dilapangan sebagai data pendukung dari penelitian ini.

Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2008 dalam pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam melakukan analisis, data yang disajikan pada bagian selanjutnya akan disesuaikan dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disajikan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan Penelitian dan menganalisisnya, maka kesimpulan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 dalam Pengawasan Bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai berjalan baik mereka melakukan tugas dengan kemampuan mereka masing-masing. Dengan awalnya masyarakat tidak mendukung tetapi setelah melakukan sosialisasi dengan baik pelaksanaan mendapat respon positif dari masyarakat artinya pelaksanaan sudah berjalan baik dilapangan dan tidak ada hambatan.
2. Pengawasan dan pengendalian bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai berjalan sesuai dengan standart dan keinginan yang telah ditetapkan. Semua berjalan dengan apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan tanpa ada kendala dan penghambat dalam pengawasan sehingga bisa dijadikan pedoman dalam pengawasan dimasa yang akan datang untuk lebih baik lagi.
3. Terkait penindakan bangunan yang berda di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan kelayakan fungsi dan mereka

menjalankan sesuai dengan standar karena pemerintah sendiri sudah terjun ke lapangan melakukan Pengawasan hingga Penindakan terhadap bangunan tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 dalam Pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cernin Kabupaten Serdang Bedagai yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal terkait pengawasan dan pengendalian lebih di tingkatkan dengan melakukan koordinasi yang baik pada pihak internal dan eksternal agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan pengawasan dan pengendalian bangunan di sepanjang Pantai Cermin.
2. Diharapkan agar pelaksanaan atau sikap pelaksana pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk melaksanakan kebijakan dengan baik serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 9 tahun 2008 dalam pengawasan bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk lebih meningkatkan lagi kinerja dalam sumber daya manusia dan pemanfaatan

sumber dana agar tidak terjadi hambatan dan kendala dalam melakukan pengawasan dan pengendalian bangunan di sepanjang Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

4. Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk meningkatkan perizinan agar masyarakat mudah melakukan izin penggunaan pemanfaatan tanah dan izin mendirikan bangunan.
5. Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk lebih meningkatkan lagi standar teknis baik itu dari segi bangunan dan jalan lingkungan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
6. Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk lebih memerhatikan kelayakan fungsi bangunan beserta sarana dan prasarana nya agar terjaga kualitas bangunan yang ada di sepanjang Pantai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal Said, 2012: *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dessler, 2005:344, *Pendekatan Pengawasan*, Yogyakarta.
- Bambang Triatmodjo, 2012, *perencanaan bangunan*, Yogyakarta.
- Friedrich. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung.: Mandar Maju.
- Moleong, Lexcy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep teori dan aplikasi)*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Suwantoro, 1997:23 :*Dasar-dasar pariwisata*, Gramedia, Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Simbolon, 2004:51, *Pengawasan dan pengendalian*, Gramedia, Jakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Tjakrawala, Kurniawan. 2002. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tisnawati dan Saefullah, 2005: 344,*Pendekatan Pengawasan*, Gramedia, Jakarta.
- Wahab, Abdul Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sumber Lain

- Sulaeman, 2014, *Analisa Pengendalian Kualitas untuk Mengurangi Produk Cacat Speedometer Mobil dengan Menggunakan Metode Qcc di PT INS*. Jurnal PASTI , Volume VIII, No 1, 71 – 95